

Monitoring Penyaluran BLT DD

PALANGKA RAYA-Guna memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) berjalan lancar dan tepat sasaran, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran meminta agar dinas terkait melakukan monitoring penyaluran tersebut.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kalteng, Rojikinnor melakukan kunjungan ke Kabupaten Seruyan. Selain pemantauan penyaluran BLT, juga melakukan pembinaan dan pengawasan BUMDes.

“Mewakili gubernur, kami berharap seluruh komponen pemerintahan, baik perangkat daerah (PD) terkait, kepala desa serta tenaga ahli pendamping desa agar memperhatikan hal-hal yang terkait kepentingan masyarakat,” katanya saat memberikan arahan di Aula Pertemuan Serbaguna Kabupaten Seruyan, Sabtu (8/8).

Diungkapkannya, kepentingan masyarakat yang dimaksud, yakni agar lebih mempercepat penyaluran DD dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat desa. Dengan demikian, maka fungsi dan peran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini dapat lebih ditingkatkan. “Harapannya juga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kalteng ini,” ungkapnya.

Dijelaskannya, berkenaan dengan badan usaha milik desa (BUMDes), guna mendukung pertumbuhan BUMDes sebagai ketahanan ekonomi masyarakat desa, maka agar pemerintah kabupaten secara intensif melakukan pengawasan dan pembinaan agar BUMDes bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.

“Sehingga dapat menjadi daya dukung pertumbuhan perkemomian pedesaan. Tentu, dalam beraktivitas selalu menjaga protokol kesehatan baik menjaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran yang diwakili sekretarisnya Diah mengatakan, mengimbau agar PKK di seluruh daerah dapat tampil lebih maksimal dalam membantu masyarakat desa.

“PKK lebih maksimal membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan”, ujar Diah. TP-PKK pun, juga membagikan 1000 pcs masker kepada masyarakat yang kurang mampu. **(abw)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Monitoring Penyaluran BLT DD*, 10 Agustus 2020;
2. <https://kpfmpalangkaraya.com/>, *Monitoring Penyaluran BLT DD*, 10 Agustus 2020.

Catatan berita:

- Pasal 38, Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 39
 - (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.